

Judul : Komisi XI: Kades butuh pendampingan awal kelola Dana Desa
Tanggal : Kamis, 30 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kelola Dana Desa Komisi XI: Kades Butuh Pendampingan Awal



Charles Meikyansah

ANGGOTA Komisi XI DPR Charles Meikyansah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pendampingan dana desa sejak tahap awal atau perencanaan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kepala desa tidak terjebak dalam persoalan hukum sehingga pengelolaan dana berjalan akuntabel.

Pendekatannya, kata Charles, bukan untuk mencari kesalahan, tapi bagaimana mereka mempunyai niat baik untuk melakukan tata kelola keuangan dana desa diberikan melalui bimbingan. "Mulai dari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sampai model pertanggungjawaban yang harus dilakukan," ujarnya di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Charles, kapasitas kepala desa untuk mengelola dana desa tidak bisa disamaratakan karena ada kesenjangan kompetensi. Ada tiga hal penting yang harus dilakukan. Pertama, bimbingan teknis. Kedua, pendampingan dari awal sampai akhir. Ketiga, menyampaikan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. "Ini dilakukan agar tidak ada kesan kepala desa dijemput karena tidak tahu prosesnya, lalu ujungnya terjadi kriminalisasi,"

kata politisi Nasdem ini.

Oleh karena itu, ia menyambut baik komitmen BPK dan BPKP yang sudah mulai melakukan pendampingan. Namun, perlu ada ketegasan dan konsistensi hingga tuntas. Sehingga tata kelola dana desa benar-benar berjalan dengan baik.

Selain itu, ia menilai integrasi dana desa dengan kearifan lokal di Bali menjadi nilai tambah. Dana desa tidak hanya untuk infrastruktur, tapi juga selaras dengan kebutuhan desa adat seperti di Kabupaten Badung.

Ini bisa menjadi proyek percontohan untuk Indonesia bagaimana mengelola dana desa. "Dana desa digunakan yang selaras dengan masalah adat. Jadi desa adat bisa merasakan manfaat dana desa, tapi tetap mempertanggungjawabkan kegiatannya," ucap legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menambahkan, pengelolaan dana desa harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Utamanya dalam mendukung penguatan desa adat sebagai fondasi pelestarian budaya, harmoni sosial, dan penggerak ekonomi.

Menurut Misbakhun, dana desa tidak semata-mata diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Tapi juga harus mampu bersinergi dengan desa adat yang memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus menopang keberlanjutan sektor pariwisata di Pulau Bali.

"Besarnya alokasi dana desa yang disalurkan langsung ke rekening desa harus diikuti dengan penerapan tata kelola yang baik dan sistem pengawasan yang berjalan secara optimal," kata Misbakhun di Jakarta, Selasa (28/7/2026). ■ TIF